

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 1 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
Baik Perspektif *Mashlahah* di Kabupaten Sumenep**

Habiya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Habiya.htn15@gmail.com

Abstrak

One of the pillars of the implementation of good governance (good governance) is a commitment to the environment, one of which is waste management, waste management must continue to preserve the environment, as well as minimizing the negative impacts that result, so that the creation of good waste management and created the environment clean and orderly. As the objectives of the sumenep government, which has been stated in local regulation No. 12 of 2012 concerning waste management. the purpose of this study is to describe, know and analyze Implementation of Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning Waste Management Against Good Government Organization Perspective *Mashlahah* Study in Sumenep Regency. This study is the result of empirical legal research, using a sociological approach. The results of this study indicate that. 1) mplementation of Article 16 and Article 19 Number 12 of 2012 concerning Waste Management is not optimal because there is no awareness and sense of responsibility of the community for environmental cleanliness. 2) According to the concept of *mashlahah* from the perspective of good local governance towards the application of the nine principles must be in accordance with Islamic law, especially in the study of the concept of *mashlahah tahsiniyyah*, namely the benefits that need to be fulfilled in order to provide perfection and beauty for human Life

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang salah satunya adalah pengelolaan sampah, penanganan pengelolaan sampah harus tetap melestarikan lingkungan hidup, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga terciptanya pengelolaan sampah yang baik dan terciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Sebagaimana yang menjadi

tujuan pemerintah sumenep, yang telah tertuang dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah. tujuan dari studi ini untuk mendiskripsikan, mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Perspektif *Mashlahah* di Kabupaten Sumenep. Studi ini merupakan hasil penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan 1) Pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah belum optimal karena belum ada kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 2) Menurut konsep *mashlahah* dari sudut pandang pemerintahan yang baik terhadap pemberlakuan sembilan prinsip harus sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam kajian tentang konsep *mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.

Kata Kunci: Pemerintahan yang baik, Pengelolaan Sampah, *Mashlahah*

Pendahuluan

Good governance mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Good governance juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih atau tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.¹ Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang salah satunya adalah pengelolaan sampah, penanganan pengelolaan sampah harus tetap melestarikan lingkungan hidup, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah diwilayahnya melalui instansi pelaksana dibidang kebersihan, namun pengelolaan tersebut masih menggunakan cara-cara konvensional serta dilaksanakan tanpa melakukan integrasi pengelolaan yang komprehensif.

Sampah akan menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sampah seperti jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi serta kemajuan teknologi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Permasalahan tersebut timbul karena manusia kurang sadar bahwa pada kegiatan ekonomi yang mereka lakukan ada aspek-aspek pendukung

¹Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, 20 Juli, hal. 18.

lainnya yang harus diperhatikan khususnya adalah lingkungan. Jika aspek lingkungan tidak diperhatikan, sangat memungkinkan terjadinya kerusakan hingga bencana alam yang akan menghambat kegiatan perekonomian manusia.²

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi kesehatan masyarakat.³

Sampah, sampai saat ini merupakan persoalan nasional yang belum memiliki pemecahan optimal bahkan cenderung menjadi masalah setiap tahunnya. Penanganan dan pengelolaan sampah masih lemah. Salah satunya dikarenakan kebijakan program pengelolaannya yang kurang terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Menangani sampah memang persoalan yang tidak mudah, semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin pula tingginya konsumsi tidak sebanding dengan ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) untuk menampungnya.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Madura mempunyai peringatan mengenai sampah. Setiap harinya terdapat 250 ton sampah yang dihasilkan di area perkotaan, sementara di tingkat Kecamatan yang lain belum terkelola dengan baik, jadi, ketika dihitung dengan sampah yang dikumpulkan dari tiga Kecamatan yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Kalianget dan Kecamatan Batuan yang sudah melakukan pengelolaan sampah maka setiap hari bisa mencapai 500 ton lebih sampah. Ditiga Kecamatan ini sampai saat ini pengelolaan sampahnya masih belum optimal, hal ini dapat dilihat di sungai penghubung Desa Kolor dan Pabian di Kecamatan Kota⁴. Sungai tersebut dipenuhi dengan sampah plastik ketika memasuki musim hujan pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perda tersebut penerapannya juga belum efektif

²Jurnal, Prisa Ambar Shentika, Pengelolaan bank sampah di Kota Probolinggo, 2016, diakses hari Jumaat, 19 Juli 2019, 11.21 WIB

³Trim Sutidja, Daur Ulang Sampah, (Jakarta:Bumi Aksara, 2001,) h, 38

⁴Data dari Dinas Lingkungan Hidup

karena kurangnya fasilitas pengangkutan sampah, kurangnya sumber daya manusia, dan tidak adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tingkat penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan, dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁵ Penelitian ini dilakukan secara empiris dikarenakan penelitian dilakukan dilapangan untuk menelaah implementasi peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sampah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis pendekatan yang dilakukan dengan mengamati gejala-gejala atau fenomena sosial yang berkaitan dengan penelitian.

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam peneliti ini dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Sumenep yang berada di Jl. Doktor Cipto Mangunkusumo No. 1, Gudang, Kolor Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang berada di Jl. KH. Mansyur No. 25, Pengarangan, Kota Sumenep, Alasan menjadikan Kantor Pemerintah Daerah Sumenep dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui sejauh mana implementasi implementasi peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sampah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier: 1) Data Primer. Data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan Dinas Lingkungan Hidup. 2) Data Sekunder diperoleh Arsip/dokumen Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Buku/literatur, Makalah, Jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Web-site dari internet yang memuat berita/informasi mengenai pengelolaan sampah.⁶

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut 1. Wawancara Wawancara yaitu dengan cara melakukan wawancara

⁵Soejono dan Abdyrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (jakarta: Remika, 1999), hlm 22

⁶Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Laporan Penelitian Kompetitif*, hlm 53

terhadap beberapa nrasumber yang telah ditentukan Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berintraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informant, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁷ 2. Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya 3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep

Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep masih mencakup tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kota dan Kecamatan Batuan sedangkan jumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep sebanyak 27 kecamatan. Dari tiga kecamatan yang sudah melakukan pengelolaan sampah sampai saat ini masih kurang optimal karena kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia dan tingkat partisipasi dari masyarakat masih sangat rendah belum ada peningkatan yang signifikan sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat yang dilarang, sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 16 No 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan di dalam Pasal 19 huruf c Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah juga di jelaskan mengenai penanganan salah satunya sistem pengangkutan sampah, di Kabupaten Sumenep kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut sampah terbilang kurang layak, karena dari 15 dram truk yang digunakan banyak yang rusak dan tidak layak digunakan. Jadi sementara ini di Kabupaten Sumenep sistemnya masih buang dan angkut saja.

Sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan masih tergolong menggunakan konsep tradisional yang menganut konsep kumpul, angkut dan buang. Sistem ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. Dengan keterbatasan fasilitas yang ada di Kabupaten Sumenep dalam hal transportasi Pengangkutan membuat tumpukan sampah semakin meningkat tetapi tidak difungsikan atau diolah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Meningkatnya

⁷Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta, 2011), h, 225

tumpukan sampah rumah tangga di Kabupaten Sumenep dari hari ke hari semakin banyak maka terjadinya bau yang tidak sedap, dan populasi udara yang tidak nyaman hal ini menimbulkan dan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat.

Pemerintah Sumenep berusaha memberikan bimbingan teknis bagaimana memanfaatkan sampah-sampah yang bisa dikelola seperti pembuatan pupuk organik dari limbah-limbah pertanian dan mengerakkan kelompok tani dengan diberi bantuan rumah kompos dengan mesin penjajahnya. Agar masyarakat tidak mudah membuang sampah sembarangan dan mulai mengerti apabila mengelola sampah ada nilai ekonomi. Keberhasilan pengelolaan sampah 80% tergantung kepada peran serta masyarakat. dari tiga kecamatan yang sudah mengelola sampah klo diliat dari segi keberhasilannya masih sekitar 10%.⁸

Pemerintah Sumenep telah menetapkan Peraturan tentang pengelolaan sampah tetapi masyarakat belum ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, di dalam peraturan daerah tersebut sudah dijelaskan mengenai larangan membuang sampah Pasal 16 dan penanganan sampah Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, tidak peduli pada aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masih banyak tumpukan sampah, dan membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Sumenep Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis kerakyatan yang dapat dan mudah untuk diimplementasikan mampu memberikan mamfaat utamanya keuntungan masyarakat dari sampah tersebut

Implementasi pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif *Mashlahah*

Implementasi pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep

Implementasi Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good local governance) di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep secara umum penerapannya sudah berjalan namun belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penerapan prinsip partisipasi, prinsip transparansi, prinsip daya tanggap, prinsip akuntabilitas di bidang pengelolaan sampah, belum sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada yakni terwujudnya lingkungan yang bersih dan pengelolaan sampah yang baik..

⁸ Imranto, Kabid Penataan dan Kapasitas Lingkungan, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 28 Juli 2019

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good local governance) di Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan sampah sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh dua domain yang melibatkan kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dua pilar yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan masyarakat Kabupaten Sumenep. Kedua unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik.

Mewujudkan pemerintahan yang baik sulit dilaksanakan dalam prakteknya di Pemerintahan Daerah Sumenep, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat harapan dan cita-cita untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang baik (good local governance) di pemerintah daerah Sumenep. Semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di bawah undang-undang tersebut secara ideal dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good local governance) pada penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah di Sumenep. Semangat otonomi daerah tersebut akan memacu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat Sumenep di bidang pengelolaan sampah dan mendorong tumbuh kembangnya demokrasi. Implementasi pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, responsif dan akuntabilitas di Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan sampah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi.

Format dan konsep pemerintahan yang baik (good local governance) yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan Umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 10 asas setidaknya ada tiga asas yang berlaku di Kabupaten Sumenep, yaitu asas efektif, efisien dan asas kepastian hukum

Implementasi pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif *Mashlahah*

Mashlahah arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan

atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung mamfaat disebut mashlahah yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan.⁹ Mencermati dalam pengertian mashlahah yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan atau kemanfaatan. Tujuan Allah menetapkan hukum mashlahah yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia.

Konsep mashlahah dari sudut pandang pemerintahan yang baik (good local governance) terhadap pemberlakuan sembilan prinsip good governance yang ditekankan sebagai tolak ukur implementasi good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah, sesuai dengan syariat Islam khususnya dalam kajian tentang konsep mashlahah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya dari sembilan prinsip good governance setidaknya ada empat prinsip yang sudah di jelaskan diatas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan sampah.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam tentang konsep mashlahah terhadap perda Kab Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam memberikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah, dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam kajian mashlahah dan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan. Secara umum dan untuk menghindari kemudharatan bagi masyarakat serta memberika rasa nyaman, aman, kesan yang rapi, tertib, teratur dan keindahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan isi kandungan yang terdapat dalam perda tersebut dan berbagai upaya Pemerintah sesuai dengan syariat Islam.

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah juga merupakan mashlahah khasas karena masalah tersebut diperuntukkan khusus untuk masyarakat. Sebenarnya Pemerintah sudah melarang masyarakat sumenep membuang sampah sembarangan untuk menjaga kebersihan dan keindahan. Namun Pemerintah juga sudah memberi kemaslahatan dengan memberi fasilitas seperti Bak sampah dan pengankutan sampah. Akan tetapi fasilitas yang diberikan masih sangat kurang. Sehingga masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat. Pada satu sisi kebijakan yang dibuat oleh bupati, untuk sementara waktu memberikan kemashlahatan bagi masyarakat. Karena memberikan fasilitas seperti Bak sampah dan pengankutan sampah untuk

⁹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h, 368

masyarakat. Akan tetapi disisi lain tidak memberikan kemaslahatan bagi pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya, karena masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.¹⁰

Kesimpulan

Pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bisa dikatakan belum optimal karena masyarakat belum ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, tidak peduli pada aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. masyarakat belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good local governance) di Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan sampah sudah berjalan namun belum efektif. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dua pilar yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan masyarakat Kabupaten Sumenep Kedua unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik. Di bidang pengelolaan sampah ada empat prinsip yang perlu dipenuhi yakni prinsip partisipasi, transparansi, responsif dan yang terakhir akuntabilitas. Sedangkan dalam konsep mashlahah dari sudut pandang goog local governance terhadap pemberlakuan sembilan prinsip harus sesuai dengan syariat islam khususnya dalam kajian tentang konsep mashlahah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya dari sembilan prinsip good governance setidaknya ada empat yaitu partisipasi, transparansi, responsif dan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

Buku

Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Remika, 1999

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2011

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Laporan Penelitian Kompetitif*

¹⁰Agus Salam, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 27 Juli 2019

Trim Sutidja, *Daur Ulang Sampah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Jurnal

Jurnal, Prisa Ambar Shentika, Pengelolaan bank sampah di Kota Probolinggo, 2016, diakses hari Jumaat, 19 Juli 2019, 11.21 WIB

Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, 20 Juli,

Wawancara

Data dari Dinas Lingkungan Hidup

Agus Salam, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 27 Juli 2019

Imranto, Kabid Penataan dan Kapasitas Lingkungan, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 28 Juli 2019